

1. URAIAN UMUM

1.1. **Judul Usul** : Peningkatan Elektabilitas Caleg Perempuan
Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilu Legislatif
di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1.2. Ketua Peneliti

Nama lengkap dengan gelar : Takdir Ali Mukti, S.Sos, M.Si
Bidang Keahlian : Analisis Politik Organisasi, Demokrasi, Partai Politik
Jabatan : Asisten Ahli
Unit Kerja : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UMY
Alamat Surat : Jl. Lingkar Barat Tamantirto Yogyakarta 55183
Telepon : (0274) 387 656 (122)
Fax : (0274) 387 646
Email : takdir_alimukti@yahoo.com

1.3. Anggota Peneliti

No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Instansi	Alokasi Waktu	
1	Winner Agung P, S.IP, MA	Partai Politik, Demokrasi	UMY	10 jam/ minggu	12 bln

1.4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah caleg perempuan yang gagal dalam kontestasi politik pada pemilu legislatif untuk DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5. Periode Pelaksanaan Penelitian:

Tahap I akan dimulai pada bulan April 2012 sampai dengan Desember 2012
Tahap II akan dimulai pada bulan April 2013 sampai dengan Desember 2013

1.6. Jumlah anggaran yang diusulkan untuk tahun pertama Rp. 42.875.000

(empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

1.7.Lokasi penelitian: Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1.8.Hasil yang ditargetkan

Ditemukannya model peningkatan elektabilitas caleg perempuan dalam kontestasi politik pada pemilu legislatif DPRD Kabupaten dan Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1.9.Perguruan tinggi pengusul: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

1.10. Instansi lain yang terlibat:

Pusat Studi Muhammadiyah dan Perubahan Sosial UMY, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY, dan Riset Center Fisipol UMY.

ABSTRAK

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah tersusunnya modul peningkatan elektabilitas perempuan dalam proses pemilihan untuk legislatif di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui beberapa aktivitas ; Mengidentifikasi elektabilitas caleg perempuan yang gagal menjadi anggota legislatif dalam pemilu 2009, mengidentifikasi penilaian masyarakat terhadap derajat representasi caleg perempuan dalam pemilu legislatif 2009, mengidentifikasi nilai dan nilai dan issue *critical* bagi peningkatan kapasitas perempuan dalam kontestasi politik, mengembangkan modul peningkatan elektabilitas perempuan dalam proses kontestasi politik, menyusun modul untuk peningkatan elektabilitas perempuan dalam proses kontestasi politik, uji coba modul dalam forum terbatas, sosialisasi modul peningkatan elektabilitas perempuan dalam proses kontestasi politik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengambilan lokasi penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terkait dengan besarnya penurunan prosentase caleg perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD di Propinsi Daerah Istimewa, sedangkan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang tingkat angka literasi dan partisipasi politiknya paling tinggi di Indonesia.

Populasi penelitian ini adalah caleg perempuan yang gagal dalam kontestasi politik dalam pemilu legislatif 2009 untuk DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengambil sampel penelitian dengan metode *stratified random random sampling*.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penyebaran quisioner, wawancara mendalam dan *focus group discussion* kepada caleg perempuan yang gagal dalam pemilu legislatif 2009 pada DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis data dilakukan dengan analisis statistika untuk melihat derajat elektabilitas caleg perempuan bagi public pemilih di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menyusun modul peningkatan elektabilitas perempuan dalam kontestasi politik pada pemilu legislatif di tingkat kabupaten dan kota akan dilakukan penelitian pustaka, dan sharing dengan para ahli political marketing maupun aktivis politik yang berhasil menjadi anggota legislatif.

BAB I.

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Konstitusi Republik Indonesia, secara tegas menegaskan diskriminasi antar anak bangsa. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".¹ Pasal tersebut, secara implisit mengikat secara yuridis bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam segala lapangan kehidupan, termasuk ranah politik.

Namun dalam kenyataan politik, terdapat fakta yang tak terbantahkan bahwa representasi perempuan dalam parlemen cenderung rendah. Dalam studi yang dilakukan oleh CETRO² tercermin bahwa keterwakilan perempuan dalam parlemen dari pemilu 1955 sampai dengan pemilu 1999 menunjukkan angka yang tidak memuaskan. Bahkan data dari hasil pemilu 1987 hingga 1999 prosentasi representasi perempuan menunjukkan tren menurun dari 13%, di tahun 1987, 12,5% di tahun 1992, 10,8% di tahun 1997, hingga 9% di tahun 1999. Program afirmatif action yang selama ini didesakan oleh aktivis perempuan guna meningkatkan derajat representasi perempuan dalam parlemen melalui pembuatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juga belum menunjukkan hasil yang menggembirakan pada pemilu 2004, yang hanya mencapai 11,8%, sebuah angka yang masih sangat jauh dari angka 30%.³

¹ UUD 1945 Pasal 27 ayat 1.

² Lihat dalam dokumen Divisi Perempuan dan Pemilu, CETRO, 2001

³ Lihat dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, terutama pasal 65 ayat (1), yang berbunyi: "Setiap partai politik beserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota untuk setiap daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen";

Bahkan, Dewi Fortuna Anwar menyatakan bahwa afirmatif action telah dibajak oleh partai politik⁴, yang menempatkan banyak caleg perempuan dalam daftar caleg namun ditempatkan dalam nomor sepatu. Caleg perempuan hanya menjadi asesoris bagi partai politik, untuk menunjukkan bahwa partai politik sudah ramah dengan kepentingan perempuan dengan pemberian kesempatan yang luas bagi perempuan untuk menjadi caleg.

Tabel 1

Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen di Indonesia

Propinsi	Jumlah	Persentase	Pria	Persentase
Aceh	3	5.2	55	94.8
Sumatera Utara	3	3.4	86	96.6
Sumatera Barat	4	6.8	55	93.2
Jambi	3	6.1	46	93
Riau	1	4.5	21	95.5
Sumatera Selatan	10	12.7	69	87.3
Bengkulu	2	4.1	47	95.9
Lampung	4	5.1	75	75
DKI Jakarta	7	7.9	82	82
Jawa barat	3	3	97	97
Jawa Tengah	5	4.8	99	95.2
Yogyakarta	3	5.1	56	94.9
Jawa Timur	11	10.6	93	89.4
Kalimantan Barat	3	5.1	56	94.9
Kalimantan Tengah	1	2	48	98
Kalimantan Selatan	6	10.1	53	89.9
Kalimantan Timur	5	10.2	44	89.8
Bali	0	0	39	100
Nusa Tenggara Barat	3	3.6	52	96.4
Nusa Tenggara Timur	2	3.4	57	96.6

Sumber: Divisi Perempuan dan Pemilu, *Cetro*, 2001

Kondisi tersebut membuat banyak pihak, terutama aktivis perempuan dan HAM menuntut untuk dibuatnya undang-undang politik baru yang menekankan diterapkannya kuota 30% secara optimal oleh semua partai politik peserta pemilu 2009. Aspirasi

⁴ Lihat pernyataan Dewi Fortuna Anwar dalam *Kompas*, 19 Januari 2004.

tersebut, akhirnya terakomodasi dengan baik oleh Pemerintah dan DPR dengan diundangkannya UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang kedua-duanya mensyaratkan adanya keharusan bagi partai-partai politik untuk mengimplementasikan 30% kuota perempuan.

Harapan meningkatnya prosentase keterwakilan perempuan di parlemen semakin menguat, tatkala Mahkamah Konstitusi mengabulkan *judicial review* beberapa partai politik yang menginginkan penentuan caleg jadi di internal partai, tidak ditentukan oleh nomor urut, namun suara terbanyak. Artinya, caleg baik laki-laki maupun perempuan berapapun nomor urutnya memiliki peluang yang sama untuk menjadi wakil rakyat. Tidak ada lagi hambatan struktural Patriarkhal yang memberikan privilege politik laki-laki atas perempuan. Optimisme tersebut juga didukung oleh data Biro Pusat Statistik (2001) jumlah perempuan Indonesia mencapai 101.628.816 jiwa atau sekitar 51% dari total penduduk Indonesia, dengan jumlah pemilih aktif di pemilu 2004 mencapai 57%.

Di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Propinsi Daerah Istimewa di mana representasi perempuan dalam parlemen mencapai 17,14% lebih tinggi daripada angka nasional yang hanya berkisar di angka 11,8% dalam pemilu legislatif 2004. Namun perubahan sistem pemilihan dalam UU Pemilu maupun Partai Politik, maupun fatwa Mahkamah Konstitusi terkait dengan suara terbanyak, justru menjadi hambatan baru yang justru menjebak elektabilitas perempuan dalam kontestasi politik. Dalam data akhir perhitungan suara pemilu legislatif di KPUD Kabupaten, Kota dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, representasi perempuan dalam DPRD Kota Yogyakarta pada pemilu 2009 justru menurun dibandingkan pemilu 2004, dari 17,14% menjadi 8%.⁵

Penghilangan kuota perempuan dalam internal partai politik yang kemudian digantikan dengan sistem suara terbanyak justru menjadi bumerang bagi perempuan. Perempuan harus bersaing dengan laki-laki secara bebas untuk mendapatkan suara konstituen, dan pemilu legislatif 2009 menunjukkan bahwa dalam posisi persaingan bebas, elektabilitas politisi perempuan relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan politisi laki-laki.

⁵ *Jawa Pos*, 6 Mei 2009.

Kondisi ini menuntut perubahan pemberdayaan elektabilitas perempuan dalam parlemen tidak hanya sekedar pembuatan kebijakan UU Pemilu dan partai politik yang pro perempuan, namun dengan aktivitas advokasi praktis untuk membangun kemampuan caleg perempuan menjadi caleg yang kompetitif. Diperlukan strategi yang tidak hanya membekali perempuan dengan dasar-dasar ketrampilan berpolitik, pengetahuan tentang esensi dan fungsi keberadaan lembaga legislatif, namun juga teknik persuasi, negosiasi dan *political marketing* yang dapat menyakinkan masyarakat pemilih bahwa mereka cukup mampu dan *capable* untuk mengemban amanat rakyat.

I.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi elektabilitas caleg perempuan yang gagal menjadi anggota legislatif dalam pemilu 2009
- 2) Mengidentifikasi penilaian masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap derajat representasi caleg perempuan dalam pemilu legislatif 2009
- 3) Mengidentifikasi nilai dan issue *critical* bagi peningkatan kapasitas perempuan dalam kontestasi politik
- 4) Mengembangkan modul peningkatan kapasitas perempuan dalam proses kontestasi politik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 5) Menyusun modul untuk peningkatan kapasitas perempuan dalam proses kontestasi politik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 6) Uji coba modul dalam forum terbatas dan uji coba dalam forum yang lebih luas
- 7) Sosialisasi modul peningkatan kapasitas perempuan dalam proses kontestasi politik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

I.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Penelitian tentang peningkatan elektabilitas perempuan dalam kontestasi politik dalam pemilu legislatif di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilaksanakan karena 3 alasan utama:

Pertama, meningkatkan kesiapan perempuan dalam proses kontestasi politik secara efektif dan efisien, sehingga keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik bukan sekedar menjadi actor asesoris pemenuhan kuota namun secara substantive mampu

memperjuangkan aspirasi perempuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya di lembaga legislatif.

Kedua, meningkatkan elektabilitas perempuan secara sistematis dan terukur dalam proses kontestasi politik pada pemilu legislatif di DPRD Kabupaten dan Kota, sebagai solusi terhadap tingginya angka kegagalan caleg perempuan dalam kontestasi politik pada pemilu legislatif.

Ketiga, mengurangi dan meminimalisir timbulnya apatisme perempuan dalam politik, khususnya dalam keterlibatan perempuan dalam konstetasi politik kontestasi politik pada pemilu legislatif

Sehingga penelitian amat diperlukan dalam rangka mendesain model peningkatan elektabilitas perempuan dalam kontestasi politik pada pemilihan legislatif pada DPRD kabupaten dan kota, ataupun DPRD Propinsi bahkan DPR. Dengan meningkatnya derajat elektabilitas perempuan di mata public maka diharapkan akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya perempuan yang menjadi anggota lembaga legislatif, sehingga diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi lahirnya produk-produk politik yang ramah kepentingan perempuan.

BAB II

STUDI PUSTAKA

Studi dari Darcy dan Susan Welch, menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik, didasarkan oleh argumen besar bahwa produk-produk politik di lembaga parlemen seringkali tidak ramah kepada kepentingan perempuan. Ketidaksadaran kepada kepentingan perempuan disebabkan karena produk politik tersebut cenderung dibuat oleh pengambil keputusan yang berjenis kelamin laki-laki, yang secara sadar ataupun tidak sadar, seringkali tidak memiliki pengetahuan ataupun kesensitifan terhadap kepentingan perempuan. Untuk menjamin agar produk politik tersebut ramah terhadap kepentingan perempuan, maka keterlibatan dalam lembaga parlemen menjadi sebuah keharusan.⁶

⁶ Lihat lebih Darcy, R., Susan Welch dan Janet Clark. 1994. *Women, Elections, and Representation*. Edisi kedua. Lincoln: Nebraska University Press.

Dari berbagai studi yang dilakukan IDEA terhadap keterlibatan perempuan dalam politik, terdapat hubungan yang positif antara banyaknya jumlah perempuan yang menduduki posisi politik dalam proses pengambilan keputusan di parlemen dengan semakin banyak produk politik yang ramah terhadap kepentingan perempuan. Studi yang dilakukan oleh IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*) di Pakistan, Philipina, dan Mesir menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik telah menghasilkan perubahan yang berarti bagi kesejahteraan dan penghormatan kepada nilai-nilai perempuan.⁷

Pada sisi yang lain, proses bagi perempuan untuk mendapatkan posisi politik di parlemen bukanlah sebuah langkah mudah.⁸ Politik dan parlemen di Negara dunia ketiga diidentikkan sebagai dunia laki-laki, dan ada kecenderungan besar bahwa lembaga parlemen seringkali tidak member kesempatan yang luas bagi keterlibatan perempuan dalam politik. Hal ini tercermin dalam studi yang dilakukan oleh Richard E. Matland⁹, yang mencoba mengidentifikasi 3 faktor besar yang mempengaruhi elektabilitas perempuan dalam parlemen; **pertama**, sistem politik dan kultur masyarakat. Yakni bagaimana sistem politik dan kultur masyarakat memandang kehadiran perempuan dalam politik. Dalam masyarakat dan sistem politik yang didominasi oleh tradisi patriarki, kehadiran perempuan dalam parlemen difahami sebagai bentuk dari kemunduran politik. Namun dalam tradisi yang egalitarian, hadirnya perempuan dalam parlemen justru difahami sebagai bentuk kemajuan politik. Artinya perempuan yang hendak maju dalam kontestasi politik untuk mendapatkan posisi di Parlemen harus mampu menghadapi tekanan kultur dunia ketiga yang seringkali tidak ramah terhadap artikulasi perempuan di parlemen.

⁷ Lihat lebih jauh lesson learned dari keterlibatan perempuan dalam politik di Filipina, Malaysia, Mesir dan Pakistan pada *Inter-Parliamentary Union Study*, No. 58, 2007, "Men and Women in Politics: Democracy Still in the Making", dapat diakses pada <http://www.ipu.org>, atau juga bisa dibaca pada Inter-Parliamentary Union. 2001. *Parliament and the Budgetary Process, Including from a Gender Perspective*. Geneva, Inter-Parliamentary Union. 2002. *The Process of Engendering a New Constitution for Rwanda Women in Politics Bibliographic Database*, lihat <http://www.ipu.org/bdf-e/BDFsearch.asp>

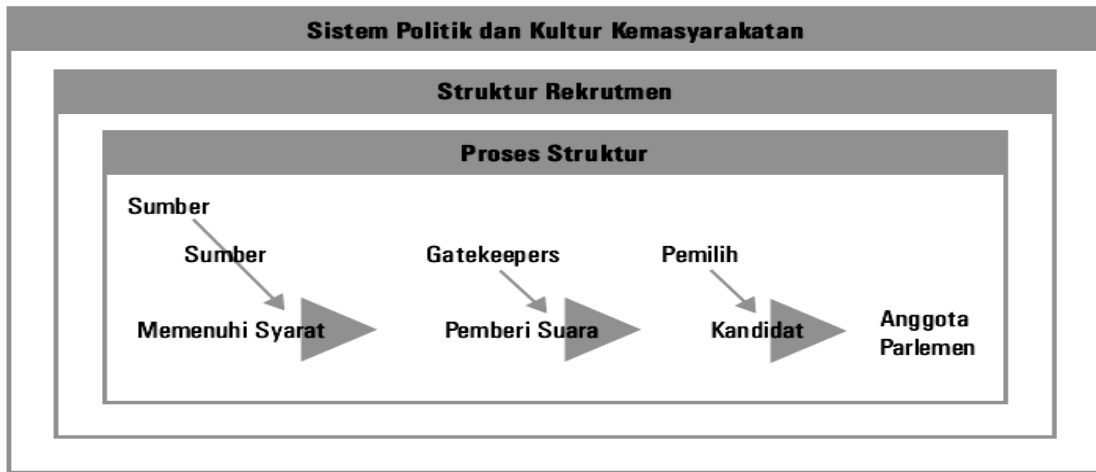
⁸Gallagher, Michael dan Michael Mars, red. 1998. *Candidate Selection in Comparative Perspective: The Secret Garden of Politics*. London: Sage.

⁹ Lihat lebih jauh studi dari Richard E. Matland, Richard E. Matlan, "Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Rekrutmen Legislatif dan Sistem Pemilihan," *Laporan Hasil Konferensi IDEA, Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*, Jakarta, Aamepro, 2002

Kedua, struktur rekrutmen, yakni bagaimana struktur rekrutmen memberikan akses dan kemudahan bagi perempuan untuk berkompetisi. Struktur rekrutmen terkait dengan proses perundangan-undangan, baik Undang-Undang Pemilu, maupun UU Partai Politik, yang meliputi syarat-syarat administrative untuk menjadi calon legislative, ataupun penentuan regulasi kuota bagi perempuan. Artinya, semakin sistem rekrutmen politik di dalam partai politik, dan system pemilu yang memberikan ruang dan akses yang luas kepada perempuan, maka akan berpengaruh positif terhadap derajat elektabilitas perempuan dalam proses rekrutmen. Untuk kondisi di Indonesia, dan Negara dunia ketiga pada umumnya, di mana system pemilihan menggunakan system proporsional, di mana penentuan calon legislative dengan mengedepankan nomor urut, ada kecenderungan membuat posisi perempuan seringkali termarginalkan dalam struktur partai politik. Namun demikian, ternyata perubahan system penerapan regulasi kuota bahkan penerapan system pemilu distrikpun, sejatinya juga belum menjamin keterwakilan perempuan dengan sendiri akan meningkat. Justru variable yang bersifat deterministik bagi peningkatan representasi perempuan dalam parlemen adalah menguatnya kapasitas perempuan pada satu sisi, dan ramahnya system rekrutmen dalam system politik.

Ketiga, proses struktur, yakni bagaimana perempuan mampu melalui proses pemilihan dari pemenuhan syarat administratif politik, mendapatkan dukungan suara dari para pemilih untuk kemudian masuk dalam daftar calon legislative (caleg), dan kemudian terpilih dalam proses pemilu. Dalam proses struktur inilah hambatan yang paling kritikal yang akan dihadapi perempuan. Perempuan seringkali mengalami keterjebakan politik, antara keinginan untuk artikulatif dalam partai politik, dan kenyataan yang sering hanya dijadikan asesoris politik.

Diagram 1
Lingkungan Struktural Untuk Menjadi Anggota Parlemen



Sumber: Richard E. Matlan, "Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Rekrutmen Legislatif dan Sistem Pemilihan," *Laporan Hasil Konferensi IDEA, Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*, Jakarta, Aneepro, 2002, Gambar ini diadaptasi dari P. Norris "Legislative Recruitment" di dalam L. Leduc, R. Niemi dan P. Norris, red. 1996. *Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective*, London: Sage. Hal. 196.

Untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen di negara dunia ketiga, terdapat beberapa pendekatan politik, social, ekonomi, dan budaya yang bisa dipergunakan. Strategi yang mampu memadukan pendekatan politik, social, ekonomi dan budaya secara sinergis untuk meningkatkan representasi perempuan dalam parlemen adalah melalui pemberlakuan *affirmative action*. *Affirmative action*, selama ini diartikulasikan secara massif oleh kelompok aktivis perempuan untuk diadopsi dalam UU Partai politik maupun UU Pemilu. Ada asumsi besar bahwa jika UU Pemilu dan Parpol mengadopsi dan mengimplementasi Regulasi Kuota akan berpengaruh positif kepada semakin banyaknya jumlah perempuan di dalam Parlemen.

Dalam studi yang dilakukan Andayani (2004) terhadap pendekatan *affirmative action*, khususnya terhadap bentuk regulasi kuota. Regulasi kuota adalah bagian dari *affirmative actions* atau disebut juga 'diskriminasi positif' sebagai penyeimbang pengalaman historis yang diskriminatif terhadap perempuan mempunyai bermacam bentuk implementasi. Terdapat beragam variasi dalam memberlakukan regulasi kuota. Perancis memberlakukan *Parity Law* pada tahun 1999. *Parity Law* yang merupakan amandemen konstitusi ini mensyaratkan setiap parpol menyertakan 50 persen caleg

perempuan. Jika sebuah parpol gagal memenuhi kualifikasi itu, pemerintah memberlakukan penalti dalam bantuan keuangan. Sedangkan di Belgia, *Electoral Act* yang diundangkan tanggal 24 Mei 1994, yang membatasi setiap parpol untuk tidak mengajukan caleg yang berjenis kelamin sama lebih dari 2/3 bagian. Jika sebuah parpol tidak mampu melaksanakan UU ini, daftar caleg harus dibiarkan kosong atau bahkan dianggap tidak sah. Bentuk lain dari *affirmative actions* adalah kebijakan kursi jatah yang dicadangkan untuk perempuan Bangladesh. Sebelum tahun 2001, Bangladesh mempraktikkan kebijakan yang mencadangkan 30 kursi khusus untuk perempuan dari 330 kursi yang tersedia. Pada Pemilu 2002, Pakistan mencadangkan 60 dari 342 kursi yang diperebutkan di tingkat DPR atau sekitar 17 persen, dan di tingkat DPRD 33 persen. Praktik serupa dilakukan oleh Jordania melalui UU Pemilu pada tahun 2001 yang menunjuk enam perempuan dari 110 kursi di tingkat DPR.¹⁰

Kebijakan tentang regulasi kuota di dalam politik di Indonesia sudah berusaha diadopsi, di mana dalam pemilu tahun 2004, dianjurkan partai politik untuk mengajukan caleg perempuan mencapai 30%. Namun karena hanya bersifat anjuran maka regulasi kuota tersebut tidak efektif untuk memaksa partai politik untuk menempatkan caleg perempuan dalam nomor-nomor kompetitif. Penerapan regulasi kuota secara ketat, terakomodasi dalam UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang kedua-duanya mensyaratkan adanya keharusan bagi partai-partai politik untuk mengimplementasikan 30% kuota perempuan.

Menarik temuan politik yang diperoleh Yuliani Paris, yang melakukan studi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui proses konstitusional dan pemilu, dengan mengambil *lesson learned* dari aktivitas politik perempuan di Filipina. Menurut ada sekitar 4 aktivitas yang bisa dilaksanakan;¹¹

a. Tingkatkan kesadaran tentang hukum dan peraturan pemilu

UU dan peraturan sistem pemilu dan pencalonan harus transparan dan bisa dipahami oleh masyarakat, terutama kaum perempuan. Dengan meningkatkan kesadaran dan

¹⁰ Lihat analisis Andayani dalam , *Kompas*, "Efektivitas Kuota Perempuan dan Pemilu," 19 Januari 2004, bandingkan dengan Reynolds, Andrew dan Ben Reilly dkk. 1997. *The International IDEA Handbook of Electoral System Design*. Stockholm: International IDEA.

¹¹ Lihat Yuliani Paris, " Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Melalui Proses Konstitusional dan Pemilu ", dalam *Laporan Hasil Konferensi IDEA, Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*, Jakarta, Aamepro, 2002, hal 8-83

pengetahuan perempuan tentang UU pemilu dan perubahan struktur dan proses pemilu, secara otomatis itu akan meningkatkan partisipasi mereka.

b. Mengorganisir perempuan untuk menjadi kandidat

Dalam sistem pemilu apapun perempuan harus dipersiapkan untuk menjadi calon, dan untuk itu perempuan harus merapatkan barisan dan mengorganisir diri mereka baik di dalam maupun di luar partai. Tingkatkan gerakan penyadaran itu melalui pelatihan kepemimpinan atau seminar jika perlu, agar dapat mengembangkan keterampilan serta pengetahuan mereka dalam menyongsong karir politik di masa mendatang.

c. Mengorganisir kelompok perempuan dan memperkuat jaringan kerja

Perkuatlah jaringan perempuan, dan lakukanlah berbagai tekanan yang tegas. Gerakan perempuan yang tegas bisa menerjemahkan keanggotaan mereka menjadi suara pemilih, yang berarti kelak partai-partai besar (yang umumnya didominasi lelaki) akan tergerak untuk memasukkan tokoh-tokoh perempuan ke dalam daftar caleg mereka.

d. Lakukan gerakan untuk mengubah struktur organisasi partai

Jumlah lelaki yang memegang posisi strategis di partai jauh melampaui apa yang dicapai perempuan. Dan ini berarti bahwa lelaki selalu ada di dalam daftar kandidat partai. Kepada perempuan harus diberikan kemudahan untuk mengakses sumber daya atau informasi yang akurat atau terkini sebagai input bagi mereka dalam mengambil keputusan atau menyajikan bukti-bukti untuk keperluan mendesakkan sebuah legislasi yang sejajar bagi kedua jender

Untuk mendapatkan posisi politik di parlemen, perempuan harus memenangkan proses kompetisi politik yang sangat ketat, yang seringkali tidak ramah terhadap kepentingan perempuan. Dalam studi yang dilakukan oleh Ani Sucipto¹², menunjukkan bahwa perempuan akan menghadapi kendala-kendala sebagai berikut:

Pertama, *faktor-faktor politik*, yakni kurangnya dukungan partai politik itu sendiri terhadap artikulasi caleg perempuan. Terdapat kenyataan yang sangat serius dalam *sistem politik* dan *partai-partai politik* Indonesia, yang sangat tidak peka jender. Dalam studi yang dilakukan oleh IDEA, sebagian besar partai politik di Indonesia lebih memilih caleg laki-laki dibandingkan caleg-caleg perempuan, dan walaupun ada caleg

¹² Lihat lebih studi dari Ani Sucipto, "Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan melalui Reformasi Konstitusi dan Pemilu", dalam *Laporan Hasil Konferensi IDEA, Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*, Jakarta, Aneepo, 2002, hal 8-12.

perempuan seringkali tidak mendapatkan posisi yang strategis. Kalaupun ada caleg perempuan yang menduduki posisi strategis dalam partai politik, seringkali sebagai fenomena perkecualian.

Kedua, *factor budaya*, yakni adanya persepsi yang menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga, bukan warga masyarakat, apalagi sebagai aktor politik di parlemen. Pemikiran seperti itu jelas sangat membatasi peluang perempuan untuk berperan aktif di panggung politik. Dunia politik dan parlemen digambarkan sebuah ruang publik yang menuntut perjuangan yang keras, dan membutuhkan energy yang besar, yang seringkali diidentikkan sebagai ruang publik laki-laki. Dalam konteks politik di Indonesia, faktor budaya relatif tidak menjadi faktor yang menghalangi partisipasi perempuan dalam politik dan parlemen.

Ketiga, *sistem pemilihan*, yakni bagaimana sistem pemilihan memberikan ruang yang luas, dan transparan dalam pemilihan perempuan di dalam struktur partai politik dan memposisikan kandidat sebagai figur yang pantas. Untuk memastikan keberfahaman terhadap pemberian akses yang luas bagi perempuan, harus diwujudkan dalam bentuk adanya produk UU tentang Partai Politik dan Pemilu yang memberikan jaminan secara konstitusional.

Untuk mengatasi berbagai persoalan dan tantangan di atas, Smita Notosusanto menawarkan langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan elektabilitas perempuan dalam kontestasi politik¹³:

Pertama, Penyusunan kurikulum dan manual pelatihan yang membahas konteks khusus yang mengharuskan peningkatan dan penguatan partisipasi politik kaum perempuan. **Kedua**, pelatihan bagi pelatih yang akan mendorong partisipasi politik kaum perempuan¹⁴ **Ketiga**, menetapkan kriteria peserta pelatihan, **keempat**, menggelar lokakarya bertopik pengembangan kapasitas yang diikuti para anggota parpol, anggota parlemen, masyarakat akademik, organisasi masyarakat mandiri dan lembaga-lembaga pemerintah.

¹³ Lihat lebih jauh kajian dari Smita Notosusanto, "Menjalin Kerjasama Antara Masyarakat Madani dan Lembaga-Lembaga Politik", dalam. *Laporan Hasil Konferensi IDEA, Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*, Jakarta, Ameenpro, 2002, hal 26-27

¹⁴ Lihat juga prasaran dari Matland, Richard E. dan Donley T. Studlar. 1998. "The Electoral Opportunity Structure for Women in the Canadian Provinces: A Comparison to U.S. State Legislatures". *Political Research Quarterly*. Vol. 51, No. 1. Hal. 117-140

Elemen penting yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan ketrampilan kepada perempuan untuk bisa berinteraksi dengan media massa, dan mempergunakannya sebagai sarana efektif untuk mengartikulasikan diri sebagai kandidat yang visioner dan kredibel. Kampanye media dapat digunakan sebagai alat yang efektif selama proses legislatif berlangsung. Kampanye media itu memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran publik tentang isu representasi politik perempuan
- b. Menggalang dukungan publik untuk kebijakan kesetaraan gender
- c. Memberikan tekanan pada parlemen untuk mengesahkan produk hukum yang berkaitan dengan kesetaraan gender .

Kampanye media harus dilancarkan di tingkat nasional dan lokal melalui media cetak dan elektronik (terutama radio), dan dengan menggunakan berbagai alat bantu seperti poster, baliho, stiker dan pin-pin bergambar. Strategi-strategi kampanye media lainnya yang efektif adalah dengan menggelar diskusi dengan sejumlah peserta di kota-kota besar, dan mengaitkan kegiatan itu dengan acara-acara besar lainnya yang menarik perhatian publik.

BAB III.

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mentransformasi caleg perempuan yang gagal dalam proses pemilu legislatif 2009, maupun perempuan untuk menjadi aktivis partai politik yang artikulatif dalam politik sehingga akan meningkatkan elektabilitas dalam proses politik di pemilu 2014; (1) bagaimana para caleg perempuan yang gagal dalam pemilu legislatif 2004 dan perempuan aktivis politik bisa belajar dan mengevaluasi diri. (2) bagaimana para caleg perempuan menjadi aktivis partai politik yang memiliki representasi yang tinggi di masyarakat sehingga akan mempengaruhi elektabilitasnya dalam pemilu 2014. (3) Bagaimana mendiskusikan peningkatan kapasitas perempuan sebagai langkah yang substantif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

b. Teknik pengumpulan data

Data penelitian didapat dari sumber utama yaitu dokumen-dokumen pemilu legislatif di KPUD propinsi DIY, penyebaran questioner dan interview terstruktur kepada caleg perempuan yang gagal dalam proses politik 2009, dan *focus group discussion* untuk mengetahui penyebab rendahnya elektabilitas caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Propinsi DIY.

c. Teknis analisis data

Tehnis analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk menganalisis peningkatan kapasitas caleg perempuan dalam pemilu 2014 adalah dengan menggunakan analisa statistik, untuk mengetahui secara akurat posisi kapasitas dan elektabilitas caleg perempuan di masyarakat. 2) Sedangkan untuk program peningkatan kapasitas dan elektabilitas perempuan, akan mempergunakan analisa kualitatif dan gender, untuk mengeksplorasi keunggulan-keunggulan spesifik dari perempuan dalam memenangkan proses kontestasi politik.

d. Populasi dan sampel

Populasi penelitian adalah caleg perempuan yang gagal menjadi anggota legislatif dalam pemilu 2009 di propinsi DIY. Untuk penentuan sampel dilakukan melalui *stratified random sampling*, untuk meningkatkan derajat representasi dari obyektivitas penelitian.

e. Lokasi penelitian

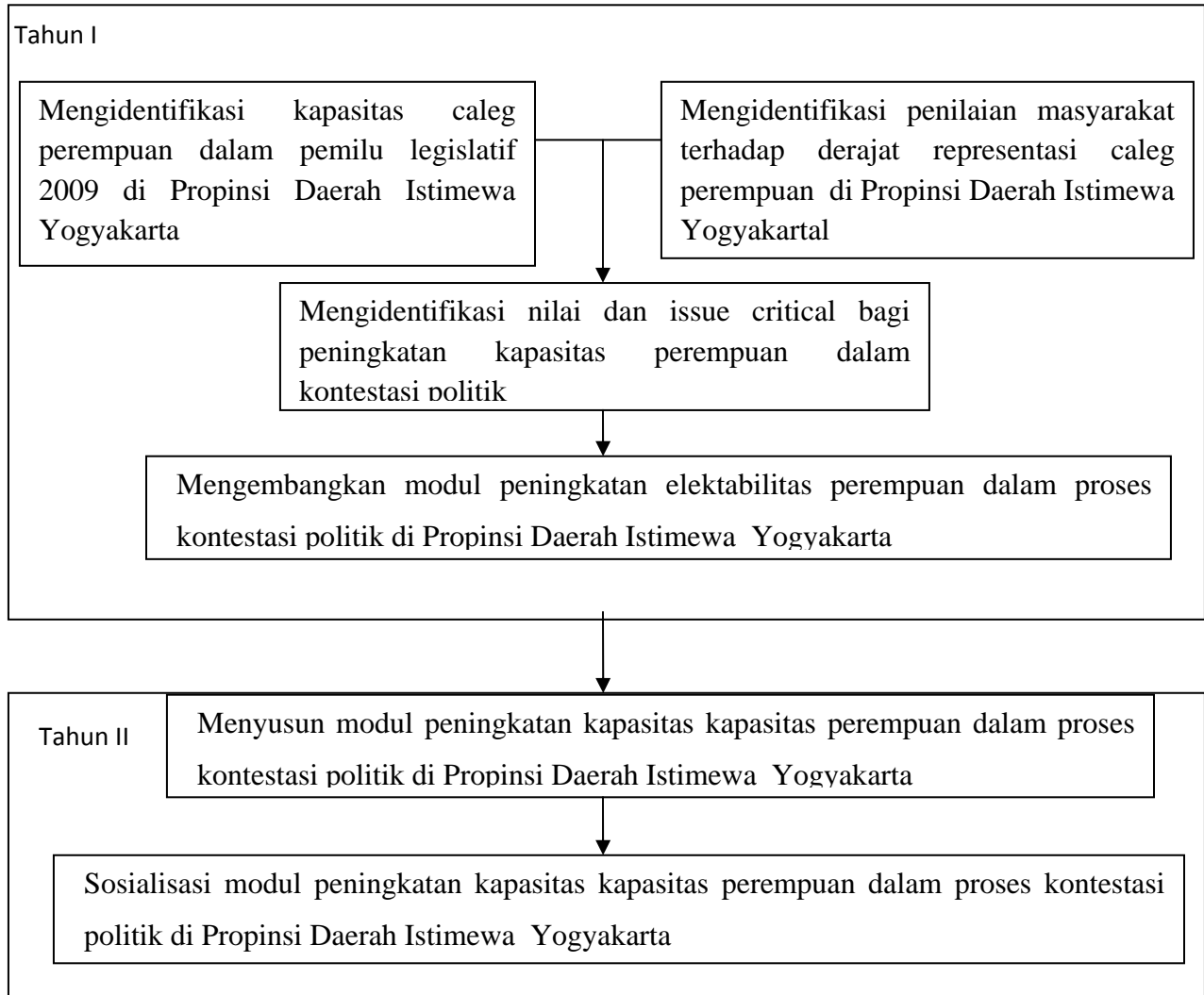
Penelitian ini dilakukan di 4 daerah pemilihan anggota legislatif Propinsi DIY yakni Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta..

Tahap penelitian dilakukan dengan mengikuti rancangan sebagai berikut:

- 8) Mengidentifikasi kapasitas caleg perempuan yang gagal menjadi anggota legislatif dalam pemilu 2009
- 9) Mengidentifikasi penilaian masyarakat terhadap derajat representasi caleg perempuan dalam pemilu legislatif 2009; (a) menentukan subyek penelitian (b) menyusun panduan dan pedoman wawancara (c) menyelenggarakan *focus group discussion*
- 10) Mengidentifikasi nilai dan nilai dan issue critical bagi peningkatan kapasitas perempuan dalam kontestasi politik: (a) melakukan penelitian terhadap program peningkatan kapasitas perempuan dalam desain partai programatik (b) mengkonsultasikan kajian pustaka tersebut dengan dengan para ahli

- 11) Mengembangkan modul peningkatan kapasitas perempuan dalam proses kontestasi politik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; (a) merancang modul peningkatan kapasitas perempuan dalam proses kompetisi politik (b) melakukan diskusi terstruktur dalam membuat rancangan model peningkatan kapasitas perempuan dalam kontestasi politik (c) melakukan ujicoba model tersebut kepada kelompok kecil (d) penyempurnaan model (e) melakukan desiminasi model
- 12) Menyusun modul untuk peningkatan kapasitas perempuan dalam proses kontestasi politik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; ; (a) penyiapan materi modul (b) mengkonsultasikan modul kepada pakar peningkatan kapasitas politik perempuan
- 13) Uji coba modul dalam forum terbatas yang dilanjutkan dengan revisi (jika diperlukan) dan uji coba dalam forum yang lebih luas.
- 14) Sosialisasi modul peningkatan kapasitas perempuan dalam proses kontestasi politik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; (a) mengundang caleg perempuan dalam pemilu legislatif 2009 yang belum berhasil menjadi anggota legislatif (b) menentukan jadwal pelaksanaan sosialisasi (c) menentukan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi (d) pelaksanaan sosialisasi

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



BAB IV. PEMBIAYAAN

No	Jenis Pengeluaran	Rincian Anggaran	
		Tahun I	Tahun II
1	Pelaksana (gaji dan upah)	15,300,000	14.700.000
2	Bahan aus (material penelitian)	3,975,000	5.000.000
3	Perjalanan	11,000,000	13.500.000
4	Pertemuan/lokakarya/seminar	5,400,000	6.000.000
5	Laporan/Publikasi	3,700,000	3.500.000
6	Lain-lain	3,500,000	8.300.000
	Total Anggaran	42,875,000	40.000.000
	Total Anggaran Keseluruhan		82.875.000

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, "Efektivitas Kuota Perempuan dan Pemilu", *Kompas*, 19 Januari 2004
- Darcy, R., Susan Welch dan Janet Clark. 1994. *Women, Elections, and Representation*. Edisi kedua. Lincoln: Nebraska University Press.
- Gallagher, Michael dan Michael Mars, 2008. *Candidate Selection in Comparative Perspective: The Secret Garden of Politics*. London: Sage.
- Inter-Parliamentary Union Study*, No. 58, 2007, "Men and Women in Politics: Democracy Still in the Making",
- , 2001. *Parliament and the Budgetary Process, Including from a Gender Perspective*. Geneva
- , 2002. *The Process of Engendering a New Constitution for Rwanda*
Women in Politics Bibliographic Database,
- L. Leduc, R. Niemi dan P. Norris, 2006. *Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective*, London, Sage
- Matland, Richard E. 2008. "Women's Representation in National Legislatures: Developed and Developing Countries". *Legislative Studies Quarterly*. Vol. 23, No. 1.
- Matland, Richard E. dan Donley T. Studlar. 1998. "The Electoral Opportunity Structure for Women in the Canadian Provinces: A Comparison to U.S. State Legislatures". *Political Research Quarterly*. Vol. 51, No. 1.
- Matland, Richard E. dan Michelle A. Taylor. 2007. "Electoral System Effect on Women's Representation: Theoretical Arguments and Evidence from Costa Rica". *Comparative Political Studies*. Vol. 30, No. 2.
- Notosusanto, Smita, 2002, "Menjalin Kerjasama Antara Masyarakat Madani dan Lembaga-Lembaga Politik", dalam. *Laporan Hasil Konferensi IDEA, Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*, Jakarta, Aneka
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Peraturan KPU No. 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2009

Peraturan KPU Nomor: Nomor: KN. 03/02/36/2006 Tentang pelaksanaan penanganan
Arsip Pemilu 2004

Peraturan Mahkamah Konsitusi No. 04/PMK/2004 Tentang Pedoman Beracara Dalam
Perselisihan Hasil Pemilu

Reynolds, Andrew dan Ben Reilly dkk. 2007. *The International IDEA Handbook of
Electoral System Design*. Stockholm: International IDEA.

Richard, E. Matlan, 2002, "Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Rekrutmen
Legislatif dan Sistem Pemilihan," *Laporan Hasil Konferensi IDEA, Memperkuat
Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*, Jakarta, Aneeka

Sucipto, Ani, 2002, "Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan melalui Reformasi
Konstitusi dan Pemilu", dalam *Laporan Hasil Konferensi IDEA, Memperkuat
Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*, Jakarta, Aneeka

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

LAMPIRAN

1. Justifikasi Anggaran

Rincian Anggaran Tahun 2012

1.1. Anggaran untuk Pelaksana (Gaji dan Upah)

No	Nama Pelaksana	Peran/Kegiatan Utama	Jumlah jam/minggu	Honor/jam	Jumlah
1	Takdir Ali Mukti, S.Sos, M.Si	Peneliti Utama	12 x 40 minggu	10,000	4,800,000
2	Winner Agung Pribadi, S.IP, MA	Anggota			
27	orang pembantu	Pembantu Peneliti	12,5 x 7 x 40	3,000	10,500,000
Jumlah					15,300,000

1.2. Anggaran Komponen peralatan

No	Nama Bahan/Peralatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Kertas HVS 80 gram	5 rim	35,000	175,000
2	Kertas continuous form 3 play	1 box	250,000	250,000
3	Alat tulis (notes, ballpoint, pensil, metaplan, kertas manila)	200 set	30,000	600,000
4	DVD Blank	2 pak	150,000	300,000
5	Tinta Printer Hitam	2 tube	200,000	400,000
6	Tinta Printer Colour	2 unit	225,000	450,000
7	Video Camcorder	1 unit	1,750,000	1,750,000
8	Spidol white board	2 dos	50,000	50,000
Jumlah				3,975,000

1.3. Anggaran Komponen Perjalanan

No	Kota/Tempat Tujuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Kota Yogyakarta	10 x 4 orang	60.000	2,400,000
2	Kabupaten Bantul	10 x 4 orang	60.000	1,400,000
3	Kabupaten Sleman	10 x 4 orang	60.000	2,400,000
4	Kabupaten Gunung Kidul	10 x 4 orang	60.000	2,400,000
5	Kabupaten Kulon Progo	10 x 4 orang	60.000	2,400,000
		Jumlah		11,000,000

1.4. Anggaran Komponen Pertemuan/Lokakarya

No	Uraian Kebutuhan	Volume	Harga Satuan	Jumlah harga
1	Uang Transport	2 x 50 org	40.000	4,000,000
2	Konsumsi	2 x 50 org	14.000	1,400,000
		Jumlah		5,400,000

1.5. Anggaran Komponen Laporan/Publikasi

No	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya Satuan	Jumlah Harga
1	Penulisan draft laporan	1 laporan	700.000	700.000
2	Penggandaan draft laporan	30 ex	20.000	600.000
3	Revisi laporan	1 laporan	350.000	350.000
4	Foto copy dan penjilidan	10 laporan	30.000	300.000
5	Pengepakan dan pengiriman	1 kali	500.000	500.000
6	Publikasi dan dokumentasi	5 kegiatan	250.000	1.250.000
		Jumlah		3,700,000

1.6. Laporan Komponen Lain-Lain

No	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya Satuan	Jumlah Harga
1	Rapat-rapat	20 kali	100.000	2.000.000
2	Penyusunan Instrumen	3 kali	500.000	1.500.000
				3,500,000

2. DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PENELITIAN

Tidak ada

3. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dipergunakan antara lain; computer, laptop, LCD projector, Overhead Projector, Tape Recorder, dan ruang kelas multimedia. Sarana ini adalah milik jurusan ilmu Hubungan Internasional Fisipol UMY, yang dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan penelitian dan sosialisasi modul peningkatan elektabilitas perempuan dalam kontestasi politik pada Pemilu Legislatif.

Lampiran 4

BIOGRAFI/ CURICULLUM VITAE

1. Nama : Takdir Ali Mukti
2. Tempat/Tgl lahir : Bantul, 21 Februari 1971
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Samiran, Parangtritis, Kretek, Bantul, DIY, 55772
6. Pendidikan :
S-1 : Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNEJ/S.Sos.
S-2 : Ilmu Politik FISIPOL UGM/M.Si

Publikasi

1. Pemakalah/Peserta Seminar Internasional dengan tema *'Malaysia-Indonesia Relations: Prospects and Disputes'*, pada subtema *"The Humanistic Approach to Developmental Planning in Border Regions"*, di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Kuala Lumpur pada 25-28 Juli 2011.
2. Penelitian, "Penyelesaian Konflik Daerah Otonom dalam Melaksanakan Kewenangan Melakukan Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Kerjasama Luar Negeri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", Tahun 2003.

Pekerjaan/Professional Career :

1. Dosen Tetap pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sejak Tahun 1996 sampai sekarang.
2. Tenaga Ahli Fraksi PAN DPRD Prov. DIY, April 2011 sampai sekarang.
3. Anggota DPRD Kabupaten Bantul Periode 1999- 2004,
4. Anggota DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta, dan 2004-2009 dengan Jabatan sebagai Pimpinan Fraksi PAN DPRD DIY.

Aktifitas dan Penghargaan :

1. Menerima Penghargaan "*The Best Performance Year 2011*" sebagai Dosen pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada Kamis, 3 Maret 2011 dari Dekan Fisipol UMY.
2. Peserta Seminar Internasional pada "*International Joint Seminar*" di International Islamic University of Malaysia (IIUM), di Kuala Lumpur pada 8-12 Desember 2010.
3. Co-Editor, Buku, "*Membangun Moralitas Bangsa*", Penerbit LPM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 1998.
4. Sebagai Participant dalam "*International Program of Saemaul Academy*" (Rural Development) di Kyungwoon University, Geongsangbuk-Do Province, South Korea, May-June 2008.
5. Ketua Panitia Khusus Pembuatan Kerjasama/Memorandum Of Understanding-Joint Cooperation antara Yogyakarta Special Province and Gangwoon Province, South Korea. (Parliament Decree in May 30th, 2009).
6. Ketua Panitia Khusus Pembuatan Kerjasama/Memorandum Of Understanding-Joint Cooperation antara Propinsi DIY dengan Kyoto, Jepang,
7. Ketua Panitia Khusus Kerjasama/Memorandum Of Understanding-Joint Cooperation antara Yogyakarta Special Province and Cheung Nam-Do Province, South Korea. (Parliament Decree, 2009).
8. Ketua Panitia Khusus DPRD DIY tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Prov. DIY 2005-2025 (Perda No. 2 Tahun 2009).
9. Ketua Panitia Khusus DPRD DIY tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Prov. DIY 2009-2013 (Perda No. 4 Tahun 2009).

Yogyakarta, 15 September 2011
Yang Membuat,

Takdir Ali Mukti, S.Sos., M.Si.

Peneliti Anggota:

1. Nama : Winner Agung Pribadi, S.IP, M.A.
2. NIK : 163 071
3. Alamat Kantor : Jurusan HI Fisipol UMY
Jl. Lingkar Barat Taman Tirto Bantul, 55183
4. Telpon : (0274) 387 656
5. Fax : (0274) 387 646
6. Email : winner.pribadi@gmail.com
7. Alamat Rumah : Jl. Letkol Subadri No.05 Sleman 55514 Yogyakarta
8. Lembaga Riset : LP3M UMY

Pendidikan

Universitas/Lokasi	Gelar	Tahun Selesai	Bidang Studi
UGM Yogyakarta	S.IP	1999	Ilmu HI
Australia National University (ANU)	MA	2007	Ilmu HI

Karya Tulis dan Penelitian

No	Tahun	Keterangan	Judul Penelitian
1.	2009	Skripsi	Gerakan Feminisme Indonesia Quo Vadis : Konflik Kultural Tradisi Parokial Masyarakat Jawa vs Feminisme Liberal di Wilayah Jawa Tengah 1999-2002
2.	2008	Jurnal HI UMY, Vo II, No.1 Mei 2005	Strategi Kampanye Caleg Perempuan di Kabupaten Sleman pada Pemilu 2004
3.	2007	Tesis	Studi Komparasi Implementasi Demokrasi di Indonesia di Era Reformasi dengan Afghanistan Pasca Invasi Amerika Serikat 2002.
4.	2008	Jurnal HI UMY, Vo IV, No.1 Februari 2008	On the Structural Theories of International Relations: Examining Waltzian Structural Realism and Wallerstein's World System Theory

Pengalaman Organisasi

No.	Tahun	Kedudukan
01.	1996-1998	Tim Advokasi DPC PPP Kabupaten Sleman
02.	1998	Inisiator DPC PAN Kecamatan Sleman
03.	1998-2001	Sekjen DPC PAN Kecamatan Sleman
04.	2001-2006	Sekjen DPD PAN Kabupaten Sleman
05.	2003-2004	Kepala Laboratorium Jurusan Hubungan Internasional UMY

Pengalaman Mengajar

No.	Nama Mata Kuliah
01.	Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
02.	Kekuatan Partai Politik di Indonesia
03.	Manajemen Kampanye

Yogyakarta, 4 September 2011
Yang Menyatakan

Winner Agung Pribadi